



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN

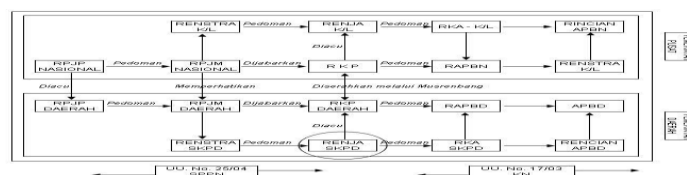
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Pasuruan dengan tetap mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra.

Berpedoman Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Perubahan Renja PD Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Penyusunan Renja PD nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian menjadi APBD. Berikut gambaran keterkaitan perencanaan penganggaran pusat maupun daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.



Gambar 1.1 Hubungan Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 Petunjuk Tehnis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
28. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2023 tentang rincian dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ruang Terbuka Hijau;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009-2029;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
40. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
41. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
42. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
43. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-Sumber Air Atau Badan Air Di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
44. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
45. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
46. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten pasuruan Tahun 2024

47. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pasuruan Tahun 2024-2026.
48. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pasuruan Tahun 2024.
49. Peraturan Bupati No Tahun 2024 tentang P-RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi acuan/ dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah- langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan.
2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program serta kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan pada Tahun 2024 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
3. Memuat pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan serta menyusun anggaran pelaksanaan yang akan dilakukan Tahun 2024 sehingga mendukung tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan yang ada dalam RPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II
- 2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan dari kinerja capaian Sasaran PD, kinerja program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Secara singkat dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

Mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan maka disajikan dalam tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Capaian Kinerja
				Target Renstra	Target PK	Realisasi	
1.	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	%	12,5	12,5		
		Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	%	52,17	52,17		
		Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	%	55	55		
		Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	%	46,67	46,67		
2.	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH	poin	85,00	85,00		

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya perolehan capaian untuk semua indikator belum bisa diperoleh karena prosedur penilaian IKLH mengikuti timeline dari KLHK.

Beberapa argumentasi yang nantinya dapat menjelaskan pencapaian target tersebut yaitu, perolehan indikator kinerja sasaran Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup nilai targetnya yaitu 12,5 %. Nilai tersebut merupakan Jumlah kecamatan yang persentase luasan RTH (publik perkotaannya + private dalam kategori cukup dibagi jumlah kecamatan di kabupaten.

Perolehan indikator kinerja sasaran Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 nilai targetnya yaitu 52,17%. Nilai tersebut merupakan jumlah desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan) dibagi jumlah seluruh desa dan kelurahan dikabupaten pasuruan ditambah jumlah kecamatan yang bebas dumping LB3 dibagi jumlah seluruh kecamatan di kabupaten pasuruan.

Perolehan indikator kinerja sasaran Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup nilai targetnya yaitu 55 %. Nilai tersebut merupakan jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu dibagi jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan.

Perolehan nilai Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah yaitu 46,67%. Nilai tersebut merupakan jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda dibagi jumlah usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan.

Tahun 2021 melalui review Renstra DLH tahun 2018-2023 telah ditambahkan sasaran meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator nilai SAKIP. Strategi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu dengan optimalisasi pemahaman terhadap penilaian SAKIP, serta bekerjasama antar komponen dalam Dinas Lingkungan Hidup untuk memenuhi dokumentasi tiap-tiap tahapan perencanaan, implementasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta melengkapi bukti dukungnya, selain itu juga meningkatkan mutu dari dokumen kelengkapan SAKIP.

Pada Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan telah melaksanakan 1 Program penunjang 10 Program Urusan Lingkungan Hidup , 23 kegiatan dan 61 sub kegiatan dengan rincian anggaran sebagai berikut :

REKAPITULASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

No	PROG/KEG/SUB KEG	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
I	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	391.528.600	20.119.791	5,14
A	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	226.202.600	9.929.791	4,39
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	21.974.600	3.520.000	3,14
2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab / Kota	204.228.000	6.409.791	16,02
B	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	165.326.000	10.190.000	6,16
3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	165.326.000	10.190.000	6,16
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	2.638.535.230	304.831.229	11,55

No	PROG/KEG/SUB KEG	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
C	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.322.725.230	141.532.979	6,09
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.639.999.600	13.405.200	0,82
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	54.798.300	0	0
6	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	627.927.330	128.127.779	20,40
D	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	184.249.000	54.470.500	29,56
7	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	178.578.000	54.470.500	30,50
8	Penghentian Pencemaran dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup	5.671.000	0	
E	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	131.561.000	108.827.750	82,72
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	131.561.000	108.827.750	82,72
III	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6.830.558.985	634.796.959	9,29
F	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	6.830.558.985	634.796.959	9,29
10	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	188.004.300	0	0
11	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.642.554.685	634.796.959	9,56
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	259.791.333	84.843.408	32,66
G	Penyimpanan Sementara Limbah B3	126.389.333	74.913.000	59,27
12	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	88.798.000	64.998.000	73,20
13	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	37.591.333	9.915.000	26,38
H	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	133.402.000	9.930.408	7,44
14	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2.042.000	0	0
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	131.360.000	9.930.408	7,56
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	414.557.830	62.733.200	15,13

No	PROG/KEG/SUB KEG	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
I	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	414.557.830	62.733.200	15,13
16	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	78.304.040	43.810.250	55,95
17	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	46.955.500	1.847.250	3,93
18	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	289.298.290	17.075.700	5,90
VI	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) , KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	51.098.800	0	0
J	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	17.078.600	0	0
19	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	17.078.600	0	0
K	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	34.020.200	0	0
20	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	34.020.200	0	0
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000	7.488.750	7,49
L	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	7.488.750	7,49
21	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100.000.000	7.488.750	7,49
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	70.000.000	11.700.000	16,71
M	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	11.700.000	16,71
22	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	70.000.000	11.700.000	16,71
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	124.368.100	5.637.000	4,53
N	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	124.368.100	5.637.000	4,53
23	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	87.834.200	3.563.000	4,06
24	Penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	36.533.900	2.074.000	5,68
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13.695.621.679	5.563.273.253	40,62

No	PROG/KEG/SUB KEG	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
O	Pengelolaan Sampah	13.695.621.679	5.563.273.253	40,62
25	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	75.000.000	8.696.311	11,60
26	Pengurangan Sampah melalui pendaur ulang sampah	516.146.479	94.106.250	18,23
27	Penanganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	6.982.092.800	1.926.078.902	27,73
28	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	110.000.000	105.480.000	95,89
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	39.433.400	12.870.000	32,64
30	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	300.573.000	51.500.000	17,13
31	Penanganan Sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	5.445.944.000	3.338.308.890	61,30
32	Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	226.432.000	16.232.900	7,17
XI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.344.594.311	4.036.858.795	35,58
P	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.392.400	20.332.316	26,62
33	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.950.000	11.821.250	51,51
34	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.199.500	1.886.250	14,29
35	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.266.000	0	0
36	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.284.900	0	0
37	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.376.000	0	0
38	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.977.000	1.643.750	20,61
39	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.339.000	4.981.066	28,73
P	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.296.866.094	3.761.557.260	36,53
40	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.954.983.246	3.307.049.644	36,93
41	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.305.099.848	436.094.616	33,41
42	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.782.600	4.119.300	42,11
43	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	27.000.400	14.293.700	52,94
Q	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.297.000	-	-
44	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.297.000	-	-
R	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.000.000	600.000	2,14
45	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.000.000	600.000	2,14

No	PROG/KEG/SUB KEG	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
S	Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.098.917	104.260.709	28,17
46	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	4.886.775	32,58
47	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.635.000	5.271.000	17,79
48	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.338.000	2.135.000	8,43
49	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.961.224	0	0
50	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.978.893	8.654.000	27,94
51	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.529.800	6.477.850	28,75
52	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.656.000	76.836.084	32,61
T	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.548.000	0	0
53	Pengadaan Mebel	34.070.000	0	0
54	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor lainnya	9.478.000	0	0
U	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.100.000	37.612.860	37,20
55	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.100.000	37.612.860	39,14
56	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000	0	0
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.291.900	112.495.650	27,02
57	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	252.471.000	99.995.650	39,61
58	Pemeliharaan Mebel	7.880.900	7.500.000	95,17
59	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.300.000	0	0
60	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.720.000	0	0
61	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.920.000	5.000.000	27,90
BELANJA		35.920.654.868	10.732.282.385	29,88

Mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, Dokumen Renja 2024 serta sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka akan disampaikan evaluasi sampai dengan triwulan II.

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/ tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi digunakan untuk penyesuaian/ perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Evaluasi Renja (anggaran) Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH/LEBIH	%
PENDAPATAN :				
- RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN	1.477.250.000	461.676.400	1.015.573.600	31,25
- RETRIBUSI SEWA TEMPAT PEMAKAMAN / PEMBAKARAN / PENGABUAN MAYAT	9.000.000	4.530.000	4.470.000	50,33
- RETRIBUSI PEMAKAIAAN LABORATORIUM	400.000.000	108.322.800	291.677.200	27,08
- PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	18.526.064	18.526.064	-
JUMLAH PAD	1.886.250.000	593.055.264	1.293.194.736	31,44

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu dari beberapa OPD yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dari retribusi persampahan sampai dengan Triwulan II sudah mencapai 31,44%, dari retribusi pemakaman mencapai 50,33% dan dari retribusi Laboratorium Lingkungan mencapai 27,08%.

Retribusi pelayanan persampahan pada triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Retribusi pemakaman berada dibawah target yang ditetapkan. Berdasarkan analisa, bahwasanya hal ini disebabkan penetapan tarif yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perbaikan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman harus segera dilaksanakan, perbaikan tersebut diagendakan dilakukan tahun 2024.

Retribusi pelayanan uji laboratorium juga mengalami capaian dibawah target yang ditetapkan. Kendala stok bahan kimia (*reagent*) yang kurang dan proses lelang bahan tersebut yang masih berlangsung selama triwulan II menyebabkan rendahnya pelayanan.

Perbaikan manajemen logistic (*buffering stock*) perlu dilakukan untuk peningkatan layanan dan perolehan PAD.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH/LEBIH	%
BELANJA :				
BELANJA PEGAWAI	9.145.243.246	3.307.049.644	5.838.193.602	36,16
BELANJA BARANG DAN JASA	22.263.209.482	7.425.232.741	16.454.629.416	33,35
BELANJA MODAL	4.512.202.140	0	4.512.202.140	0

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH/LEBIH	%
BELANJA :				
JUMLAH BELANJA	35.920.654.868	10.732.282.385	25.188.372.483	29,88

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi serapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada tribulan II jika dibandingkan dengan PAGU anggaran satu tahun yaitu masih pada kisaran 29,88%.

Perencanaan anggaran yang kurang cermat, kurang kesiapan dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa menjadi sebab rendahnya capaian realisasi tribulan 2.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH/LEBIH	%
DANA :				
DAU	31.652.672.868	10.732.282.385	25.188.372.483	33,91
DAK	3.309.320.000	-	-	-
DBHCHT	958.662.000	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi serapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada tribulan II jika dibandingkan dengan PAGU anggaran satu tahun yaitu masih pada kisaran 29,88%.

Perencanaan anggaran yang kurang cermat, kurang kesiapan dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa menjadi sebab rendahnya capaian realisasi tribulan II.

Hasil evaluasi Renja (kinerja) Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dalam renja 2024 mendukung sasaran PRPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026 melalui 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator yang sampai dengan tribulan II tahun 2024 semuanya belum tercapai kinerjanya, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN / INDIKATOR	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	%
1	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
	1. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	12,50%	12,50%	-	-
	2. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	52,17%	52,17%	-	-
	3. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	55%	55%	-	-
	4. Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	46,67%	46,67%	-	-
2	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
	1. Nilai SAKIP DLH	85,00 poin	85,00 poin	-	-

Target realisasi untuk indikator sasaran pada rencana aksi DLH Kab. Pasuruan diletakkan pada tribulan 4 (empat), hal ini dikarenakan untuk indikator-indikator tersebut

verifikasi nilai capaiannya yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim dan KLHK. Jadwal pelaksanaan verifikasi sudah ditetapkan melalui laman website KLHK antara bulan November – Desember.

2. Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung tercapainya indikator sasaran diatas, dilakukan melalui pelaksanaan 11 program, 23 kegiatan dan 61 sub kegiatan. Capaian kinerja sampai tribulan II tahun 2024 evaluasinya sebagai berikut:

- a. Program pendukung indikator sasaran Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup.

Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup, didukung oleh 2 Program, yaitu

- 1). Program Perencanaan Lingkungan Hidup, 2). Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI),

Pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada tribulan II tahun 2024, tertuang pada tabel di bawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		ANALISA KETERLAKSANAAN	KETERANGAN		
			Anggaran	TARGET TBT	Anggaran	TARGET TBT		Anggaran	Analisa Keterlaksanaan	Pencapaian Tindak Lanjut
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	90%	90%	94,28%			Pelaksanaan kegiatan ini penting untuk mendukung tercapainya indikator sasaran ini.		
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat	90%	90%	94,28%			1.1 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat		
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	90%	90%	94,28%			Pelaksanaan kegiatan ini penting untuk mendukung tercapainya indikator sasaran ini.		
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat	90%	90%	94,28%			1.2 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat		
3	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	90%	90%	94,28%			Pelaksanaan kegiatan ini penting untuk mendukung tercapainya indikator sasaran ini.		
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat	90%	90%	94,28%			1.3 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat		
4	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	90%	90%	94,28%			Pelaksanaan kegiatan ini penting untuk mendukung tercapainya indikator sasaran ini.		
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat	90%	90%	94,28%			1.4 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat		
5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	90%	90%	94,28%			Pelaksanaan kegiatan ini penting untuk mendukung tercapainya indikator sasaran ini.		
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat	90%	90%	94,28%			1.5 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat		
6	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	90%	90%	94,28%			Pelaksanaan kegiatan ini penting untuk mendukung tercapainya indikator sasaran ini.		
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat	90%	90%	94,28%			1.6 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat		
7	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	90%	90%	94,28%			Pelaksanaan kegiatan ini penting untuk mendukung tercapainya indikator sasaran ini.		
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat	90%	90%	94,28%			1.7 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat		
8	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	90%	90%	94,28%			Pelaksanaan kegiatan ini penting untuk mendukung tercapainya indikator sasaran ini.		
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat	90%	90%	94,28%			1.8 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat		
9	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	90%	90%	94,28%			Pelaksanaan kegiatan ini penting untuk mendukung tercapainya indikator sasaran ini.		
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat	90%	90%	94,28%			1.9 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat		
10	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	90%	90%	94,28%			Pelaksanaan kegiatan ini penting untuk mendukung tercapainya indikator sasaran ini.		
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat	90%	90%	94,28%			1.10 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah selesai dibuat dan disetujui oleh masyarakat		

Pelaksanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada tribulan II tahun 2024, tertuang pada tabel di bawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	TARGET TBT	REALISASI	TARGET	TARGET TBT	REALISASI	KETERANGAN			
			Kinerja	Kinerja	Kinerja	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Analisa Keterlaksanaan	Analisa Keterlaksanaan	Analisa Tambahan	Pencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah pekarangan di Kab. Pasuruan)	8,06%	0		3.483.753.153	591.555.950	375.322.200		Realisasi sudah tapi SP2D belum disahkan sehingga masuk bulan berikutnya		Harus di bulan berikutnya
3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati KabupatenMute	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	6,37%	0		3.483.753.153	591.555.950	375.322.200		Realisasi sudah tapi SP2D belum disahkan sehingga masuk bulan berikutnya		Harus di bulan berikutnya
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Luas RTH yang dikelola	1 hektar	0		154.949.000				Ditajukan bulan I		
4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola meliputi kawasan Keanekaragaman KabupatenMute	1,02 Ha	0		3.338.804.933	591.555.950	375.322.200		Realisasi sudah tapi SP2D belum disahkan sehingga masuk bulan berikutnya		Harus di bulan berikutnya

- Pelaksanaan Program Pengendalian B3 dan LB3 pada tribulan II tahun 2024, tertuang pada tabel di bawah ini :

[illegible]

Pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan pada tribulan II tahun 2024, tertuang pada tabel di bawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ANUSUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ANUSUB KEGIATAN	TARGET	TARGET TB I	REALISASI	TARGET	TARGET TB I	REALISASI	KETERANGAN			
			Kinerja	Kinerja	Kinerja	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Analisa Keberhasilan	Analisa Ketidakeberhasilan	Analisa Tambahan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	100%		25%	16.213.074.450	4.861.225.800	1.572.722.000				
		Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	100%		25%							
3	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	27%		19%	16.213.074.450	4.861.225.800	1.572.722.000				
		Persentase penanganan sampah										
			72%		4,6%							
4	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Diusun dan Ditetapkan	2 dokumen			5.313.200						
5	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemantauan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemantauan Kembali	3 laporan	1 laporan		1.377.672.500	167.021.950	19.380.000		Beberapa pengaduan mengalami keterlambatan dikarenakan pengantaran KPA pada akhir tribulan I (Maret)		perlu kecermatan dalam realisasi anggaran, karena anggaran menjadi pendukung tercapainya kinerja
6	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Ditah, Digroses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	197.157 ton	49.289 ton	49.200 ton	14.015.857.750	4.514.868.800	1.526.548.300		Beberapa pengaduan mengalami keterlambatan dikarenakan pengantaran KPA pada akhir tribulan I (Maret)		perlu kecermatan dalam realisasi anggaran, karena anggaran menjadi pendukung tercapainya kinerja
7	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 kelompok		1 kelompok	380.927.700	3.658.800	1.173.700	Kegiatan sosialisasi Pokir yang rencananya dilaksanakan di tribulan I dimajukan ke tribulan Maret (Tribulan I)			
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 dokumen		-	53.561.600	12.500.000			Beberapa rapat koordinasi dan sinkronisasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, OPD lain dan Pemerintah desa. Visi/urutan terkait sehingga belum direncanakan untuk DLH melaksanakannya ditribulan I		perlu kecermatan dalam realisasi anggaran, karena anggaran menjadi pendukung tercapainya kinerja
9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemengaman Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 unit	1 unit	2 unit	386.034.900	163.176.250	25.620.000		Beberapa pengaduan mengalami keterlambatan dikarenakan pengantaran KPA pada akhir tribulan I (Maret)		perlu kecermatan dalam realisasi anggaran, karena anggaran menjadi pendukung tercapainya kinerja

c. Program pendukung indikator sararan Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, didukung oleh 1 Program, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada tribulan II tahun 2024, tertuang pada tabel di bawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INISIASI KEGIATAN	REKAPITULASI KEMERIA PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP			REKAPITULASI KEMERIA PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP			REKAPITULASI KEMERIA PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP			REKAPITULASI KEMERIA PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP			REKAPITULASI KEMERIA PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP			REKAPITULASI KEMERIA PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP		
		TARGET Kegiatan	TARGET Tahun	REALISASI Kegiatan	TARGET Kegiatan	TARGET Tahun	REALISASI Kegiatan	TARGET Kegiatan	TARGET Tahun	REALISASI Kegiatan	TARGET Kegiatan	TARGET Tahun	REALISASI Kegiatan	TARGET Kegiatan	TARGET Tahun	REALISASI Kegiatan	TARGET Kegiatan	TARGET Tahun	REALISASI Kegiatan
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Target yang telah tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Penanganan dan Pemeliharaan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Target yang telah tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan Penanganan dan Pemeliharaan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Target yang telah tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan Penanganan dan Pemeliharaan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Target yang telah tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Peningkatan Penanganan dan Pemeliharaan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Target yang telah tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

d. Program pendukung indikator sararan Indeks Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah didukung oleh 5 Program, yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat .

Il tahun 2024, tertuang pada tabel di bawah ini :

[illegible]

Pelaksanaan Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat pada tribulan II tahun 2024, tertuang pada tabel di bawah ini :

[illegible]

Pelaksanaan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat pada tribulan II tahun 2024, tertuang pada tabel di bawah ini :

[illegible]

Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada triwulan II tahun 2024, tertuang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :

IKU PD:

Target :

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)		
										I				II		III										IV
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	(diisi sasaran PD, disesuaikan dengan programnya)	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				tidak diisi	tidak diisi					per april 2024														
		Bidang Urusan Lingkungan Hidup						DPA MURNI																		
		1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100	%	Rp 16,578,886,571		100	%	#####	95	Rp 2,596,494,681		Rp 1,440,364,114	0	-	0	-	95	Rp 4,036,858,795	95	36	95	Rp 4,036,858,795	95	24
		1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subk egiatan pada dok	100	%	Rp 262,970,925		100	%	Rp 76,392,400	25	Rp 14,961,250		Rp 5,371,066	0	-	0	-	25	Rp 20,332,316	25	27	25	Rp 20,332,316	25	8
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	Rp 159,451,217		3	dokumen	Rp 22,950,000	1	Rp 11,431,250		Rp 390,000					1	Rp 11,821,250	33	52	1	Rp 11,821,250	33.33	7
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	Rp 19,048,333		2	dokumen	Rp 13,199,500	1	Rp 1,886,250		Rp -					1	Rp 1,886,250	50	14	1	Rp 1,886,250	50	10
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dokumen	Rp 11,604,740		2	dokumen	Rp 7,266,000	0	Rp -		Rp -					0	Rp -	-	-	0	Rp -	0	0
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD sesuai dengan ketentuan	2	dokumen	Rp 16,882,214		2	dokumen	Rp 5,284,900	0	Rp -		Rp -	0	-	0	-	0	Rp -	-	-	0	Rp -	0	0
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dokumen	Rp 11,604,740		2	dokumen	Rp 2,376,000	0	Rp -		Rp -					0	Rp -	-	-	0	Rp -	0	0
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	4	laporan	Rp 11,716,373		4	laporan	Rp 7,977,000	1	Rp 1,643,750		Rp -	0	-	0	-	1	Rp 1,643,750	25	21	1	Rp 1,643,750	25	14
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3	laporan	Rp 32,663,308		3	laporan	Rp 17,339,000	0	Rp -		Rp 4,981,066					0	Rp 4,981,066	-	29	0	Rp 4,981,066	0	15
		2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100	%	Rp 11,910,435,002		100	%	#####	100	Rp 2,485,272,690		Rp 1,276,284,570	0	-	0	-	100	Rp 3,761,557,260	100	37	100	Rp 3,761,557,260	100	32
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	orang/ b ulan	Rp 7,934,849,671		80	orang/ b ulan	Rp 8,954,983,246	80	Rp 2,183,672,728		Rp 1,123,376,916	0	-	0	-	80	Rp 3,307,049,644	100	37	80	Rp 3,307,049,644	100	42
		9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	dokumen	Rp 3,906,909,207		13	dokumen	Rp 1,305,099,848	3	Rp 292,405,962		Rp 143,688,654	0	-	0	-	3	Rp 436,094,616	23	33	3	Rp 436,094,616	8.33	11
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	dokumen	Rp 15,869,699		7	dokumen	Rp 9,782,600	1	Rp 4,119,300		Rp -					1	Rp 4,119,300	14	42	1	Rp 4,119,300	16.67	26

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)													
									I		II		III		IV																				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19	laporan	Rp	38,404,672			18	laporan	Rp	27,000,400	4	Rp	5,074,700			0	Rp	9,219,000	0	-	0	-	4	Rp	14,293,700	22	53	4	Rp	14,293,700	21.05	37
		12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	dokumen	Rp	14,401,752											0	Rp	-	-	-	0	Rp	-	0				0		0			
		3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	Rp	62,407,593			100	%	Rp	12,297,000				0	Rp	-	-	-	0	Rp	-	0					0		0			
		13	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	dokumen	Rp	19,202,336			2	dokumen	Rp	12,297,000				0	Rp	-	-	-	0	Rp	-	0					0		0			
		14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7	dokumen	Rp	43,205,256										0	Rp	-	-	-	0	Rp	-	0					0		0			
		4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	Rp	190,376,762			100	%	Rp	28,000,000	100	Rp	600,000		0	Rp	600,000	100	2	100	Rp	600,000	100				100		0			
		15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	orang	Rp	53,017,650			2	dokumen	Rp	28,000,000	1	Rp	600,000		0	Rp	600,000	50	2	1	Rp	600,000	5				5		1			
		16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	355	unit	Rp	137,359,111										0	Rp	-	-	-	0	Rp	-	0					0		0			
		5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	Rp	1,525,169,715			100	%	Rp	370,098,917	100	Rp	49,264,416	Rp	54,996,293	0	Rp	104,260,709	100	28	100	Rp	104,260,709	100			100		7			
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48	paket	Rp	336,167,626			10	paket	Rp	15,000,000	2	Rp	4,886,775	Rp	-			2	Rp	4,886,775	20	33	2	Rp	4,886,775	4.17			1			
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	paket	Rp	542,900,992			8	unit	Rp	29,635,000			Rp	5,271,000			0	Rp	5,271,000	-	18	0	Rp	5,271,000	0			0		1		
		19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8	paket	Rp	48,005,841			8	paket	Rp	25,338,000			Rp	2,135,000			0	Rp	2,135,000	-	8	0	Rp	2,135,000	0			0		4		
		20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9	paket	Rp	60,120,685			8	paket	Rp	10,961,224			Rp	-	0	-	0	-	0	Rp	-	-	-	0	Rp	-	0		0		0	
		21	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	paket	Rp	81,554,242			12	paket	Rp	30,978,893	3	Rp	5,830,000	Rp	2,824,000	0	-	0	-	3	Rp	8,654,000	25	28	3	Rp	8,654,000	25			11	
		22	Penyediaan Bahan/Material	6	paket	Rp	38,404,672												0	Rp	-	-	-	0	Rp	-	0			0		0		0	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)			
											I		II		III		IV			13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%			
1	2	3	4	5			6		7			8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		
				12	laporan	Rp	K	Rp	12	laporan	Rp	3	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		49,080,403			12	laporan	Rp 22,529,800	3	Rp 3,996,150		Rp 2,481,700			3	Rp 6,477,850	25	29	3	Rp 6,477,850	25	25	13		
		24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	Rp 368,935,254		12	laporan	Rp 235,656,000	3	Rp 34,551,491		Rp 42,284,593			3	Rp 76,836,084	25	33	3	Rp 76,836,084	25	25	21		
		6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100	%	Rp 1,488,153,059		100	%	Rp 43,548,000					0	-	0	-	0	Rp -	-	-	0	Rp -	0	0	
		25	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1	unit	Rp 498,986,916									0				0	Rp -	-	-	0	Rp -	0	0	
		26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	Rp 495,144,721									0				0	Rp -	-	-	0	Rp -	0	0	
		27	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	unit	Rp 108,845,658		16	unit	Rp 34,070,000					0	-	0	-	0	Rp -	-	-	0	Rp -	0	0	
		28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	unit	Rp 35,213,436									0	-	0	-	0	Rp -	-	-	0	Rp -	0	0	
		29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18	unit	Rp 349,962,328		7	unit	Rp 9,478,000					0				0	Rp -	-	-	0	Rp -	0	0	
		7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	Rp 416,572,167		100	%	Rp 101,100,000	100	Rp 13,186,275		Rp 24,426,585	0	-	0	-	100	Rp 37,612,860	100	37	100	Rp 37,612,860	100	9	
		30	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	laporan	Rp 336,167,627		48	laporan	Rp 96,100,000	12	Rp 13,186,275		Rp 24,426,585	0	-	0	-	12	Rp 37,612,860	25	39	12	Rp 37,612,860	25	11	
		31	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	laporan	Rp 80,404,541		3	laporan	Rp 5,000,000					0	-	0	-	0	Rp -	-	-	0	Rp -	0	0	
		8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100	%	Rp 722,801,349		100	%	Rp416,291,900	50	Rp 33,210,050		Rp 79,285,600	0	-	0	-	50	Rp 112,495,650	50	27	50	Rp 112,495,650	50	16	
		32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6	unit	Rp 436,509,734		210	unit	Rp252,471,000	45	Rp 20,710,050		Rp 79,285,600			45	Rp 99,995,650	21	40	45	Rp 99,995,650	750	23			
		33	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12	unit	Rp 1,108,935		20	unit	Rp7,880,900	20	Rp 7,500,000		Rp -			20	Rp 7,500,000	100	95	20	Rp 7,500,000	166.67	676			
		34	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	unit	Rp 35,751,534		70	unit	Rp11,300,000		Rp -		Rp -			0	Rp -	-	-	-	0	Rp -	0	0		
		35	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2	unit	Rp 213,469,971		2	unit	Rp126,720,000		Rp -		Rp -	0	-	0	-	0	Rp -	-	-	-	0	Rp -	0	0
		36	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2	unit	Rp 35,961,175		5	unit	Rp17,920,000	2	Rp 5,000,000		Rp -	0	-	0	-	2	Rp 5,000,000	40	28	2	Rp 5,000,000	100	14	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)				
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5			6		7			8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%			
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
		2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	66.67	%	Rp 1,151,289,013			44.44	%	Rp 391,528,600	14	Rp 16,819,791		Rp 3,300,000					14	Rp 20,119,791	32	5	14	Rp 20,119,791	21.00		2	
		9 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan	66.1	%	Rp 655,601,173			59.32	%	Rp 226,202,600		Rp 9,929,791							0	Rp 9,929,791	-	4	0	Rp 9,929,791	0		2	
		37 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan	2	dokumen	Rp 366,751,561			2	dokumen	Rp 204,228,000	1	Rp 6,409,791						1	Rp 6,409,791	50	3	1	Rp 6,409,791	50		2		
		38 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	dokumen	Rp 288,849,612			2	dokumen	Rp 21,974,600	2	Rp 3,520,000						2	Rp 3,520,000	100	16	2	Rp 3,520,000	200		1		
		10 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dokumen lingkup KLHS yang tervalidasi	55.56	%	Rp 495,687,840			20	%	Rp 165,326,000		Rp 6,890,000		Rp 3,300,000				0	Rp 10,190,000	-	6	0	Rp 10,190,000	0		2		
		32 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2	dokumen	Rp 495,687,840			1	dokumen	Rp 165,326,000	1	Rp 6,890,000		Rp 3,300,000				1	Rp 10,190,000	100	6	1	Rp 10,190,000	50		2		
		3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara	65	%	Rp 2,652,939,270			55	%	Rp 2,638,535,230		Rp 232,378,507		Rp 72,452,722				0	Rp 304,831,229	-	12	0	Rp 304,831,229	0		11		
			Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	60	%				40	%		20							20	Rp -	50	-	20	Rp -	33.33		0		
		11 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	100	%	Rp 1,782,843,369			100	%	Rp 2,322,725,230		Rp 90,037,407		Rp 51,495,572				0	Rp 141,532,979	-	6	0	Rp 141,532,979	0		8		
			persentase sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan	100	%				40	%									0	Rp -	-	-	0	Rp -	0		0		
		33 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	119	dokumen	Rp 416,164,414			25	dokumen	Rp 1,639,999,600		Rp -						0	Rp -	-	-	0	Rp -	0		0		
		34 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor	5	dokumen	Rp 161,422,531			2	dokumen	Rp 54,798,300	7	Rp 4,927,400		Rp 8,477,800				7	Rp 13,405,200	350	24	7	Rp 13,405,200	140		8		
		35 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1254	dokumen	Rp 1,205,256,424			1204	dokumen	Rp 627,927,330		Rp 85,110,007		Rp 43,017,772				0	Rp 128,127,779	-	20	0	Rp 128,127,779	0		11		
		12 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	7	%	Rp 403,185,752			5	%	Rp 184,249,000	1.1	Rp 35,533,850		Rp 18,936,650				1.1	Rp 54,470,500	22	30	1.1	Rp 54,470,500	15.71		14		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)									
								I		II		III		IV															
1	2	3	4	5			6		7			8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%			
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		36	Pemberian informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	70	laporan	Rp	368,598,739			50	laporan	Rp	178,578,000	11	Rp	35,533,850			11	Rp	54,470,500	22	31	11	Rp	54,470,500	15.71	15
		37	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	4	titik	Rp	34,587,013			4	titik	Rp	5,671,000						0	Rp	-	-	-	0	Rp	-	0	0
		13	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	35	%	Rp	466,910,149			23	%	Rp	131,561,000	16.67	Rp	106,807,250			16.67	Rp	108,827,750	72	83	16.67	Rp	108,827,750	47.63	23
		38	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	2	dokumen	Rp	24,705,009							0	Rp	-			0	Rp	-	-	-	0	Rp	-	0	0
		39	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	2	dokumen	Rp	31,622,412							0	Rp	-			0	Rp	-	-	-	0	Rp	-	0	0
		40	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	16	dokumen	Rp	378,960,316			12	dokumen	Rp	131,561,000	8	Rp	106,807,250			8	Rp	108,827,750	67	83	8	Rp	108,827,750	50	29
		41	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	2	dokumen	Rp	31,622,412							0	Rp	-			0	Rp	-	-	-	0	Rp	-	0	0
		4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab.Pasuruan)	9.9	%	Rp	4,636,834,851			8.8	%	Rp	6,830,558,985	9.54	Rp	333,333,673			9.54	Rp	634,796,959	108	9	9.54	Rp	634,796,959	96.36	14
		14	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	22.22	%	Rp	4,636,834,851			100	%	Rp	6,830,558,985		Rp	333,333,673			0	Rp	634,796,959	-	9	0	Rp	634,796,959	0	14
		42	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	dokumen	Rp	3,801,190,281			1	dokumen	Rp	188,004,300						0	Rp	-	-	-	0	Rp	-	0	0
		43	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	15	ha	Rp	84,470,895							0	Rp	-			0	Rp	-	-	-	0	Rp	-	0	0
		44	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	900	ha	Rp	751,173,674			800	Ha	Rp	6,642,554,685		Rp	333,333,673			0	Rp	634,796,959	-	10	0	Rp	634,796,959	0	85
		5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3	100	%	Rp	621,694,594			33	%	Rp	259,791,333		Rp	17,649,808			0	Rp	84,843,408	-	33	0	Rp	84,843,408	0	14
		15	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah	100	%	Rp	219,848,065			100	%	Rp	126,389,333	46.67	Rp	10,346,900			46.67	Rp	74,913,000	47	59	46.67	Rp	74,913,000	46.67	34

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)													
									I		II		III		IV																			
1	2	3	4	5			6		7			8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%								
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		45	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30	dokumen	Rp	119,523,819			30	dokumen	Rp	88,798,000	14	Rp	6,121,400		Rp	58,876,600					14	Rp	64,998,000	47	73	14	Rp	64,998,000	46.67	54
		46	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	30	dokumen	Rp	100,324,247			30	laporan	Rp	37,591,333	11	Rp	4,225,500		Rp	5,689,500					11	Rp	9,915,000	37	26	11	Rp	9,915,000	36.67	10
		16	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten	100	%	Rp	401,846,529			100	%	Rp	133,402,000	36.67	Rp	7,302,908		Rp	2,627,500					36.67	Rp	9,930,408	37	7	36.67	Rp	9,930,408	36.67	2
		47	fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	dokumen	Rp	4,108,570			1	dokumen	Rp	2,042,000		Rp	-							0	Rp	-	-	-	0	Rp	-	0	0	
		48	Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewengannya	3	dokumen	Rp	397,737,959			3	dokumen	Rp	131,360,000		Rp	7,302,908		Rp	2,627,500					0	Rp	9,930,408	-	8	0	Rp	9,930,408	0	2
		6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	40	%	Rp	1,155,880,330			53	%	Rp	414,557,830	14	Rp	16,116,450		Rp	46,616,750					14	Rp	62,733,200	26	15	14	Rp	62,733,200	35	5
		17	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	17.52	%	Rp	1,155,880,330			15.3	%	Rp	414,557,830		Rp	16,116,450		Rp	46,616,750					0	Rp	62,733,200	-	15	0	Rp	62,733,200	0	5
		49	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	45	dokumen	Rp	520,612,067			45	dokumen	Rp	78,304,040	2	Rp	5,153,500		Rp	38,656,750					2	Rp	43,810,250	4	56	2	Rp	43,810,250	4.44	8

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)								
										I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		50	Pengawasan Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	17	dan usah	Rp 560,226,378			15	dan usah	Rp 289,298,290	5	Rp 10,962,950		Rp 6,112,750					5	Rp 17,075,700	33		6	5	Rp 17,075,700	29.41		3
		51	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pengembangan PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	6	orang	Rp 39,793,606			5	orang	Rp 46,955,500	2			Rp 1,847,250					2	Rp 1,847,250	40		4	2	Rp 1,847,250	33.33		5
		52	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	17	dokumen	Rp 35,248,279														0	Rp -	-		-	0	Rp -		0	0
		7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	42	%	Rp 84,232,202			25	%	Rp 51,098,800									0	Rp -	-		-	0	Rp -		0	0
		18	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang diakui	1	lembaga	Rp 34,570,909			1	lembaga	Rp 17,078,600									0	Rp -	-		-	0	Rp -		0	0
		53	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	12	dokumen	Rp 34,570,909			8	dokumen	Rp 17,078,600									0	Rp -	-		-	0	Rp -		0	0
		19	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	4	lembaga	Rp 49,661,293			2	lembaga	Rp 34,020,200									0	Rp -	-		-	0	Rp -		0	0
		54	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	4	dokumen	Rp 49,661,293			2	dokumen	Rp 34,020,200									0	Rp -	-		-	0	Rp -		0	0
		8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	9.94	%	Rp 468,655,083			5.16	%	Rp 100,000,000		Rp 6,137,500		Rp 1,351,250					0	Rp 7,488,750	-		7	0	Rp 7,488,750		0	2

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)				
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		20	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	103	lembaga	Rp 468,655,083			88	lembaga	Rp 100,000,000	13	Rp 6,137,500		Rp 1,351,250				13	Rp 7,488,750	15	7	13	Rp 7,488,750	12.62	2
		55	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	dokumen	Rp 468,655,083			4	dokumen	Rp 100,000,000	1	Rp 6,137,500		Rp 1,351,250				1	Rp 7,488,750	25	7	1	Rp 7,488,750	25	2
		9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baikPersentase Perusahaan berwawasan lingkungan (proper) di wilayah kabupaten	3.4	%	Rp 152,132,242			2.8	%	Rp 70,000,000				Rp 11,700,000				0	Rp 11,700,000	-	17	0	Rp 11,700,000	0	8
		21	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	5.28	%	Rp 152,132,242			4.58	%	Rp 70,000,000				Rp 11,700,000				0	Rp 11,700,000	-	17	0	Rp 11,700,000	0	8
		56	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4	entitas	Rp 152,132,242			4	entitas	Rp 70,000,000				Rp 11,700,000				0	Rp 11,700,000	-	17	0	Rp 11,700,000	0	8
		10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	100	%	Rp 160,318,551			100	%	Rp 124,368,100	100	Rp 4,350,000		Rp 1,287,000				100	Rp 5,637,000	100	5	100	Rp 5,637,000	100	4
		22	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	100	%	Rp 160,318,551			100	%	Rp 124,368,100	100	Rp 4,350,000		Rp 1,287,000				100	Rp 5,637,000	100	5	100	Rp 5,637,000	100	4
		57	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditanganl	15	dokumen	Rp 127,541,957			15	pengadu an	Rp 87,834,200	3	Rp 3,563,000						3	Rp 3,563,000	20	4	3	Rp 3,563,000	20	3
		58	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadu kewenangan kabupaten/kota	15	dokumen	Rp 32,776,594			15	perkara	Rp 36,533,900	1	Rp 787,000		Rp 1,287,000				1	Rp 2,074,000	7	6	1	Rp 2,074,000	6.67	6
		11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase capaian pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	82	%	Rp 21,774,889,208			79.3	%	Rp 13,695,621,679	19.83	Rp 4,799,426,844		Rp 763,846,409				19.83	Rp 5,563,273,253	25	41	19.83	Rp 5,563,273,253	24.18	26
				Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	54.9	%				32.1	%		8.03							8.03	Rp -	25	-	8.03	Rp -	14.63	0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	5			6		7			8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%				14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		23 Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase capaian pengurangan sampah	24.6	%	Rp 21,774,889,208			22.2	%	Rp 13,695,621,679		Rp 4,799,426,844		Rp 763,846,409			0	Rp 5,563,273,253	-	41	0	Rp 5,563,273,253	0		0		0	26
			Persentase capaian penanganan sampah	38.4	%				22.8	%								0	Rp -	-	-	0	Rp -	0		0		0	0
		59 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	33	kelompok	Rp 300,108,056			33	kelompok	Rp 110,000,000	9	Rp 67,330,000		Rp 38,150,000			9	Rp 105,480,000	27	96	9	Rp 105,480,000	27.27		35			
		60 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	dokumen	Rp 28,937,389			1	dokumen	Rp 39,433,400				Rp 12,870,000			0	Rp 12,870,000	-	33	0	Rp 12,870,000	0		44			
		61 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	18	unit	Rp 10,814,709,187			8	unit	Rp 300,573,000	1	Rp 1,950,000		Rp 49,550,000			1	Rp 51,500,000	13	17	1	Rp 51,500,000	5.56		0			
		62 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2	dokumen	Rp 1,284,701			2	dokumen	Rp 75,000,000				Rp 8,696,311			0	Rp 8,696,311	-	12	0	Rp 8,696,311	0		677			
		63 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	laporan	Rp 5,138,802,739												0	Rp -	-	-	0	Rp -	0		0			
		64 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	167029	ton	Rp 5,491,047,136												0	Rp -	-	-	0	Rp -	0		0			
		65 Penanganan sampah melalui pengoprasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik						38	unit	Rp 5,445,944,000	20	Rp 3,338,308,890					20	Rp 3,338,308,890	53	61	20	Rp 3,338,308,890	0		0			

[illegible]

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu strategis pemerintahan sebagai berikut:

1. Pencemaran Badan Air Permukaan

Potensi pencemaran air sungai di kabupaten pasuruan cukup tinggi mengingat banyaknya jumlah industri mulai dari skala kecil hingga besar. Tercatat sekitar 1.455 industri besar dan sedang yang yetsebar di wilayah Kabupaten Pasuruan yang berkontribusi pada debit air limbah yang dibuang ke badan sungai. Nilai IKA diperoleh dari data pemantauan air sungai pada 9 DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan dan satu titik pemantauan tambahan di Mata Air Umbulan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa Timur.

2. Bencana Banjir

Bencana banjir termasuk bencana alam yang hampir pasti terjadi pada setiap datangnya musim penghujan. Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain. Selama Tahun 2021 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 748 mm.

3. Perubahan atau alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun

Berbagai kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan mengakibatkan permasalahan pemanfaatan lahan yang ada semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan secara nyata harus diikuti dengan peningkatan penyediaan kawasan permukiman yang ada. Demikian pula dengan pembangunan di sektor industri, perdagangan dan jasa. Pembukaan kawasan baru sebagai kawasan hunian dan kawasan untuk kegiatan industri serta kegiatan perekonomian telah

mengakibatkan perubahan-perubahan fungsi lahan sebagaimana aslinya. Pemanfaatan lahan industri seyogyanya diarahkan pada lahan-lahan yang tidak produktif. Beberapa kawasan pertanian yang semula merupakan lahan produktif di wilayah Kecamatan Purwosari, Wonorejo, Gempol, Beji dan Pandaan pada saat ini telah banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Gejala tersebut dapat mengakibatkan penurunan secara drastis produksi daya guna lahan. Melihat kondisi saat ini, perlu dilakukan secara terencana, baik sebelum dilakukan pembukaan lahan atau setelah pembukaan lahan. Pengembalian fungsi lahan sebagaimana asalnya perlu dilakukan untuk menghindari dampak yang lebih parah, yaitu terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

4. Kurang Optimalnya Pengelolaan Sampah

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada akhir tahun 2018 adalah 1.630.011 Jiwa. Diasumsikan di Tahun 2018 sampah yang dihasilkan dari 24 kecamatan adalah sebesar 1.141 ton per hari atau setara dengan dengan 4.483 m³/hari. Hingga saat ini sampah yang dapat terlayani di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) adalah sekitar 80 ton/hari atau $\pm 7,0\%$ dan yang dapat dikelola oleh Tempat Pengolahan Sementara (TPS) 3R, bank sampah dan sektor industri daur ulang lain adalah sekitar 57 ton/hari atau $\pm 5\%$, dikelola oleh masyarakat sendiri di sumbernya sekitar 80 ton atau $\pm 7,0\%$ dan sisanya sebesar $\pm 81\%$ atau 924 ton/hari tidak dikelola.

Kabupaten Pasuruan saat ini memiliki 1 (satu) unit Tempat Pengolahan Akhir sampah yang berlokasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan 52 unit TPS 3R dan 301 unit bank sampah yang tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah hingga saat ini dilakukan di 14 kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada.

Dengan adanya satu TPA yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan sehingga tidak mampu untuk menjangkau dan melayani seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyikapi permasalahan persampahan direncanakan pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) baru di 4 lokasi, TPST di 15 lokasi, PDUS di 2 lokasi, TPS 3R serta Bank Sampah di masing-masing desa minimal ada 1 unit.

Masalah persampahan yang timbul ini menjadi permasalahan yang kompleks antara lain terjadinya penurunan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas udara dan bau serta penurunan kualitas tanah serta air tanah, sehingga perlu dilakukan

pendekatan holistik dan upaya yang terintegrasi untuk menyelesaikan masalah persampahan di Kabupaten Pasuruan.

5. Pencemaran Udara

Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas rumah kaca akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan, sampah dengan metode *open dumping*, serta sektor transportasi. Terlebih lagi Kabupaten Pasuruan berada pada jalur strategis transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, sehingga berpotensi tumbuh kegiatan perekonomian cukup besar baik di bidang industri, perdagangan, maupun sektor transportasi. Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 adalah 82,25 mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 78,83, tahun 2019 kenaikan sebesar 0,17 menjadi 79,00 dan pada tahun 2020 adalah 82,22 dimana pada Indeks Kualitas Udara secara Nasional belum melampaui target Nasional dimana Indeks Kualitas Udara Secara Nasional adalah 84,01.

6. Kurangnya Kesadaran Terhadap Kelestarian Lingkungan

Lingkungan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Kurangnya kesadaran untuk menjaga kelestarian dapat berdampak buruk bagi manusia. Salah satu penyebab utama yang bisa menyebabkan masalah kebersihan lingkungan adalah kurangnya kepedulian itu sendiri terhadap lingkungannya, padahal sudah seharusnya menyadari dan peduli terhadap lingkungan sekitar karena keadaan lingkungan juga mempengaruhi kehidupan itu sendiri.

7. Regulasi Bidang Lingkungan Hidup

Melestarikan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama sebagai syaratnya, yaitu adanya sarana institusi, dana dan sarana hukum. Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksana kebijakan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijakan lingkungan yang telah dirumuskan pemerintah dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai dasar dan wadahnya. Sesuai dengan surat Edaran Kemendagri No 660/5112/Bangda/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RJPD, dinas Lingkungan Hidup Pasuruan telah merencanakan tahapan awal penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berupa Inventarisasi Data Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada APBD Tahun 2023. Namun demikian, kegiatan finalisasi penyusunan data validasi dokumen yang dimaksud tidak dapat kami anggarakan didalam APBD Tahun 2023 dikarenakan sub kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD tidak

dibuka didalam SIPD akan tetapi tertuang pada Perubahan Renstra 2018-2023. Setelah adanya koordinasi dengan Bappelitbanda selaku pengampu kegiatan Penyusunan RPJPD tahun 2025-2045, yang pada awalnya direncanakan finalisasi dan validasi dokumen KLHS RPJPD diselesaikan pada awal tahun 2024, namun seiring perkembangannya sesuai hasil koordinasi dengan Bappelitbangda melalui surat Nomor 050/545/424.101/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal agenda Penyusunan Rancangan awal Dokumen RPJPD tahun 2025-2045 harus diselesaikan pada tahun 2023, maka dokumen KLHS harus terselesaikann dan dilakukan validasi paling lambat semester II tahun 2023. Untuk itu mengingat pentingnya kekuatan penyelenggaraan KLHS dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk finalisasi dan validasi dokumen KLHS RPJPD pada tahun 2023.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arah tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah :

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Dengan penjabaran ke dalam 9 Misi yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;**
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pasuruan menyinergikan dengan tujuan pembangunan Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	IKU/SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024		Keterangan
					Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan : Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup						
1	persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	IKU	Persen	a/n	1,11	1,11	
	Sasaran PD I : Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						
2	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	IKU	Persen	12,50	12,50	12,50	
3	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	IKU	Persen	39,78	52,17	52,17	
4	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	IKU	Persen	55	55	55	
5	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	IKU	Persen	40	46,67	46,67	
	Sasaran PD II : Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						
6	Nilai SAKIP DLH	IKU	Poin	82,00	85,00	85,00	
	Indikator SPM/IKK						
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasuruan	IKK	Poin	65,47	62,504	62,504	
8	Indeks Kualitas Air (IKA)	IKK	Poin	56,98	53,59	53,59	
9	Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKK	Poin	83,46	81,04	81,04	
10	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	IKK	Poin	46,76	43,53	43,53	

No	Uraian	IKU/SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024		Keterangan
					Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	IKK	Persen	72,25	45	45	
12	Tersedianya data dan informasi penanaman sampah di wilayah kabupaten/kota	IKK	Persen	100	10	10	
13	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	IKK	Persen	77,78	46,67	46,67	
14	Data izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	IKK	Persen	100	100	45	
15	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	IKK	Persen	5,88	0,13	0,19	
16	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	IKK	Persen	0	67	67	
17	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	IKK	Persen	0	17	17	
18	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	IKK	Persen	100	100	100	
19	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	IKK	Persen	100	100	100	

Penyusunan Perubahan Renja berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2024 sebagai acuan bagi OPD yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2024 ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah :

1. Dinas / Instansi / Organisasi terkait pengelola lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan;
2. Masyarakat / Pemerhati / Komunitas pegiat lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan;
3. Masyarakat lingkungan sekolah di wilayah Kabupaten Pasuruan;
4. Industri / usaha / UMKM yang berpotensi sebagai sumber pencemar dan atau perusak di wilayah Kabupaten Pasuruan.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 akan dilakukan melalui 1 program penunjang dan 10 program utama, 23 kegiatan dan 61 sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perbedaan yang signifikan tentang nama program, kegiatan maupun sub kegiatan, serta mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dalam proses transisi diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam Perubahan Renstra 2018- 2023.

3.3.1 Prioritas 2024

I. Program Pengelolaan Persampahan

Program pengelolaan persampahan dengan sasaran meningkatnya capaian pengurangan dan penanganan sampah terhadap JAKSTRADA, dengan strategi **pengelolaan sampah** dan **pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular**. Program pengelolaan sampah juga menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan dari tarif pengangkutan sampah di TPA.

II. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan sasaran Meningkatnya sungai yang tidak tercemar, lokasi pemantauan kualitas udara dan penurunan lahan kritis di wilayah Kabupaten.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sector dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program pengendalian pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan baik pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup, baik yang dilakukan sesuai kewenangan DLH maupun sinergi dengan stake holder lainnya (sektor pemerintah, swasta dan masyarakat).

3.3.2 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota:

1. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

B. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

3. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

II. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

C. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:

4. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
5. Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

6. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

D. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:

7. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.
8. Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

E. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:

9. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.

III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

F. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota:

10. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati
11. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

IV. Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

G. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3:

12. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
13. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

H. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:

14. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
15. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan;

V. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- I. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

16. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;
17. Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

VI. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH

J. Kegiatan Pengakuan MHA, karifan lokal, pengetahuan tradisonal, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH:

19. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA karifan lokal atau pengetahuan tradisional dan HAK kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH;

K. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

20. Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH;

VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

L. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

21. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

M. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

22. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

N. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota:

23. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH

Kabupaten/Kota.

24. Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

X. Program Pengelolaan Persampahan

O. Kegiatan Pengelolaan Sampah:

25. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
26. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;
27. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
28. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota;
29. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
30. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan;
31. Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah;
32. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional.

XI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

P. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

33. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
34. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
35. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
36. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
37. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
38. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
39. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Q. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

40. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
41. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
42. Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD

43. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD
- R. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
44. Sub Kegiatan Pengamanan barang milik daerah SKPD
- S. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
45. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- T. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
46. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 47. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 48. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 49. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 50. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 51. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 52. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- U. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
53. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 54. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
55. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 56. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- W. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
57. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 58. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 59. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 60. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 61. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

TABEL 3.2
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB IV RKPD TAHUN 2024	PEMETAAN BERDASARKAN SIPD TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA	
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN
1	Pengelolaan sampah yg menunjang PAD kab pasuruan dari tarif pengangkutan sampah di TPA		Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 13,695,621,679	Rp 13,695,621,679	79,30 % dan 32,10 %	79,30 % dan 32,10 %
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Rp 13,695,621,679	Rp 13,695,621,679	22,20 % dan 22,80 %	22,20 % dan 22,80 %
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp 110,000,000	Rp 110,000,000	33 kelompok	33 kelompok
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Rp 39,433,400	Rp 39,433,400	1 dokumen	1 dokumen

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB IV RKPD TAHUN 2024	PEMETAAN BERDASARKAN SIPD TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA	
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp 300,573,000	Rp 300,573,000	8 unit	8 unit
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	2 dokumen	2 dokumen
			Penanganan sampah melalui pengoprasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Penanganan sampah melalui pengoprasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Rp 5,445,944,000	Rp 5,445,944,000	38 unit	38 unit

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB IV RKPD TAHUN 2024	PEMETAAN BERDASARKAN SIPD TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA	
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN
			Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa,RDF, pusat pengomposan, biodegester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodegester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan	Rp 6,982,092,800	Rp 6,982,092,800	111466 ton	111466 ton
			Pengurangan sampah melalui pendaur ulang sampah	Pengurangan sampah melalui pendaur ulang sampah	Rp 516,146,479	Rp 516,146,479	100 ton	100 ton
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional	Rp 226,432,000	Rp 226,432,000	8591 ton	8591 ton

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB IV RKPD TAHUN 2024	PEMETAAN BERDASARKAN SIPD TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA	
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN
2	DLH sebagai leading sector dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 2,638,535,230	Rp 2,638,535,230	55% dan 40%	55% dan 40%
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Rp 2,322,725,230	Rp 2,322,725,230	100% dan 40%	100% dan 40%
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp 1,639,999,600	Rp 1,639,999,600	119 dokumen	119 dokumen

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB IV RKPD TAHUN 2024	PEMETAAN BERDASARKAN SIPD TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA	
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp 54,798,300	Rp 54,798,300	1 dokumen	1 dokumen
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 627,927,330	Rp 627,927,330	1204 dokumen	1204 dokumen
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 6,830,558,985	Rp 6,830,558,985	8.80%	8.80%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB IV RKPD TAHUN 2024	PEMETAAN BERDASARKAN SIPD TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA	
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp 178,578,000	Rp 178,578,000	50 laporan	50 laporan
			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 5,671,000	Rp 5,671,000	4 titik	4 titik
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 131,561,000	Rp 131,561,000	23%	23%
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Rp 131,561,000	Rp 131,561,000	12 kegiatan	12 kegiatan
3		Optimalisasi Pemrosesan Akhir Sampah di TPA Wonokerto	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 13,695,621,679	Rp 13,695,621,679	79,30 % dan 32,10 %	79,30 % dan 32,10 %

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB IV RKPD TAHUN 2024	PEMETAAN BERDASARKAN SIPD TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA	
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Rp 13,695,621,679	Rp 13,695,621,679	22,20 % dan 22,80 %	22,20 % dan 22,80 %
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Rp 300,573,000	Rp 300,573,000	8 unit	8 unit

Tabel 3.3
Tabel Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

KABUPATEN : PASURUAN
PERANGKAT DAERAH : Dinas Lingkungan Hidup

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN							
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP						
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11	12		13		14	15=12-8	16=13-9	17	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
	Bidang Lingkungan Hidup																					
	UNSUR PENDUKUNG																					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen/lapor an administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100	%	Rp	11,488,838,560	100	%	Rp	11,344,594,311	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen/lapor an administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100	%	Rp	11,291,019,090	DAU	-	-	53,575,221	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiat an/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100	%	Rp	52,919,500	100	%	Rp	76,392,400	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiat an/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan	100	%	Rp	71,509,467	DAU	-	-	4,882,933	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	Rp	21,919,500	3	dokumen	Rp	22,950,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	Rp	21,869,625	DAU	-	-	1,080,375	Rencana refocusing anggaran
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	dokumen	Rp	5,000,000	2	dokumen	Rp	13,199,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	dokumen	Rp	12,160,275	DAU	-	-	1,039,225	Rencana refocusing anggaran
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	dokumen	Rp	3,500,000	2	dokumen	Rp	7,266,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	dokumen	Rp	6,565,400	DAU	-	-	700,600	Rencana refocusing anggaran

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN				
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP			
1	2	3	4	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD sesuai dengan ketentuan	2	dokumen	Rp 1,500,000	2	dokumen	Rp 5,284,900	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD sesuai dengan ketentuan	2	dokumen	Rp 4,788,910	DAU	-	-	495,990	Rencana refocusing anggaran
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	dokumen	Rp 1,000,000	2	dokumen	Rp 2,376,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	dokumen	Rp 2,164,400	DAU	-	-	211,600	Rencana refocusing anggaran
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	laporan	Rp 5,000,000	4	laporan	Rp 7,977,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4	laporan	Rp 7,607,550	DAU	-	-	369,450	Rencana refocusing anggaran
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	laporan	Rp 15,000,000	3	laporan	Rp 17,339,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3	laporan	Rp 16,353,307	DAU	-	-	985,693	Rencana refocusing anggaran
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100	%	Rp 10,336,199,862	100	%	Rp 10,296,866,094	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100	%	Rp 10,258,173,806	DAU	-	-	38,692,288	Rencana refocusing anggaran
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	orang/bulan	Rp 8,842,745,882	80	orang/bulan	Rp 8,954,983,246	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	orang/bulan	Rp 8,954,983,246	DAU	-	-		Rencana refocusing anggaran
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	13	dokumen	Rp 1,466,768,480	13	dokumen	Rp 1,305,099,848	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	13	dokumen	Rp 1,272,099,848	DAU	-	-	33,000,000	Rencana refocusing anggaran
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7	dokumen	Rp 4,106,100	7	dokumen	Rp 9,782,600	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7	dokumen	Rp 8,667,276	DAU	-	-	1,115,324	Rencana refocusing anggaran

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN							
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)		TARGET IK			PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP				
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	18	laporan	Rp	14,581,400	18	laporan	Rp	27,000,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	18	laporan	Rp	22,423,436	DAU	-	-	4,576,964	Rencana refocusing anggaran
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisnPrognos is Realisasi Anggaran	2	dokumen	Rp	7,998,000	2	dokumen	Rp	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisnPrognos is Realisasi Anggaran	2	dokumen	Rp	-	DAU	-	-		
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100	%	Rp	12,300,100	100	%	Rp	12,297,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100	%	Rp	12,297,000	DAU	-	-		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7	dokumen	Rp	3,500,000	7	dokumen	Rp	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7	dokumen	Rp	-	DAU	-	-		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	dokumen	Rp	8,800,100	2	dokumen	Rp	12,297,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	dokumen	Rp	12,297,000	DAU	-	-		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100	%	Rp	26,000,000	100	%	Rp	28,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100	%	Rp	18,000,000	DAU	-	-	10,000,000	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	122	unit	Rp	1,000,000	122	unit	Rp	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	122	unit	Rp	-	DAU	-	-		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	orang	Rp	25,000,000	16	orang	Rp	28,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	16	orang	Rp	18,000,000	DAU	-	-	10,000,000	Rencana refocusing anggaran
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100	%	Rp	204,136,098	100	%	Rp	370,098,917	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100	%	Rp	370,098,917	DAU	-	-		

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN						
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK			PAGU RP			TARGET IK	PAGU RP				
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11	12		13		14	15=12-8	16=13-9	17
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	<i>paket</i>	Rp	10,000,000	10	<i>paket</i>	Rp	15,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	<i>paket</i>	Rp	15,000,000	DAU	-	-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	<i>paket</i>	Rp	19,995,000	8	<i>paket</i>	Rp	29,635,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	<i>paket</i>	Rp	29,635,000	DAU	-	-	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	<i>paket</i>	Rp	19,999,000	8	<i>paket</i>	Rp	25,338,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	<i>paket</i>	Rp	25,338,000	DAU	-	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	<i>paket</i>	Rp	5,998,408	8	<i>paket</i>	Rp	10,961,224	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	<i>paket</i>	Rp	10,961,224	DAU	-	-	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	<i>paket</i>	Rp	10,000,000	8	<i>paket</i>	Rp	30,978,893	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	<i>paket</i>	Rp	30,978,893	DAU	-	-	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	<i>paket</i>	Rp	999,690	2	<i>paket</i>	Rp	-	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	<i>paket</i>	Rp	-	DAU	10	-	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	<i>paket</i>	Rp	1,495,000	2	<i>paket</i>	Rp	22,529,800	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	<i>paket</i>	Rp	22,529,800	DAU	-	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	<i>laporan</i>	Rp	135,649,000	12	<i>laporan</i>	Rp	235,656,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	<i>laporan</i>	Rp	235,656,000	DAU	-	-	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100	%	Rp	464,582,000	100	%	Rp	43,548,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100	%	Rp	43,548,000	DAU	-	-	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	<i>unit</i>	Rp	447,782,000	1	<i>unit</i>	Rp	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	<i>unit</i>	Rp	-	DAU	-	-	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	<i>unit</i>	Rp	-	1	<i>unit</i>	Rp	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1	<i>unit</i>	Rp	-	DAU	-	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN						
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP					
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	unit	Rp	4,740,000	16	unit	Rp	34,070,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	unit	Rp	34,070,000	DAU	-	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	9	unit	Rp	7,084,000	9	unit	Rp	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	9	unit	Rp	-	DAU	-	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	7	unit	Rp	4,976,000	7	unit	Rp	9,478,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	7	unit	Rp	9,478,000	DAU	-	-	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	Rp	101,100,000	100	%	Rp	101,100,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	Rp	101,100,000	DAU	-	-	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	48	laporan	Rp	96,100,000	48	laporan	Rp	96,100,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	laporan	Rp	96,100,000	DAU	-	-	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3	laporan	Rp	5,000,000	3	laporan	Rp	5,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3	laporan	Rp	5,000,000	DAU	-	-	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100	%	Rp	291,601,000	100	%	Rp	416,291,900	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100	%	Rp	416,291,900	DAU	-	-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	210	unit	Rp	143,881,000	210	unit	Rp	252,471,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	210	unit	Rp	252,471,000	DAU	-	-	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	unit	Rp	1,000,000	20	unit	Rp	7,880,900	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	unit	Rp	7,880,900	DAU	-	-	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	unit	Rp	10,000,000	70	unit	Rp	11,300,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	unit	Rp	11,300,000	DAU	-	-	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2	unit	Rp	126,720,000	2	unit	Rp	126,720,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2	unit	Rp	126,720,000	DAU	-	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024			P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN								
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP		TARGET IK		PAGU RP		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP							
1	2	3	4	6		7		8		9		10		11	12		13		14	15=12-8		16=13-9		17
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	Rp	10,000,000	5	unit	Rp	17,920,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	Rp	17,920,000	DAU		-		-		
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	44.44	%	Rp	114,999,500	44.44	%	Rp	391,528,600	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	44.44	%	Rp	380,319,600	DAU		-		-	11,209,000	
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	59.32	%	Rp	75,229,300	59.32	%	Rp	226,202,600	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	59.32	%	Rp	217,212,600	DAU		-		-	8,990,000	
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH	2	dokumen	Rp	25,000,000	2	dokumen	Rp	204,228,000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH	2	dokumen	Rp	196,688,000	DAU		-		-	7,540,000	Rencana refocusing anggaran
		Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH	2	dokumen	Rp	50,229,300	2	dokumen	Rp	21,974,600	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir	2	dokumen	Rp	20,524,600	DAU		-		-	1,450,000	Rencana refocusing anggaran
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dokumen lingkup KLHS yang tervalidasi	20	%	39,770,200		20	%	165,326,000		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dokumen lingkup KLHS yang tervalidasi	20	%	163,107,000		DAU		-		-	2,219,000	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	dokumen	Rp	39,770,200	1	dokumen	Rp	165,326,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	dokumen	Rp	163,107,000	DAU		-		-	2,219,000	Rencana refocusing anggaran
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air	55	%	Rp	495,254,500	55	%	Rp	2,638,535,230	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air	55	%	Rp	2,586,959,930			-		-	51,575,300	
			Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	40	%			40	%				Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	40	%					-		-		

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN			
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP		
1	2	3	4	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	100	%	Rp 395,254,500	100	%	Rp 2,322,725,230	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	100	%	Rp 2,285,699,930		-	- 37,025,300	
			persentase sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan	40	%		40	%			persentase sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan	40	%			-	-	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	119	dokumen	Rp 54,999,900	119	dokumen	Rp 1,639,999,600	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	119	dokumen	Rp 1,631,327,600	DAK	-	- 8,672,000	Rencana refocusing anggaran
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor	1	dokumen	Rp 4,999,900	1	dokumen	Rp 54,798,300	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor	1	dokumen	Rp 53,445,000	DAU	-	- 1,353,300	Rencana refocusing anggaran
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1204	dokumen	Rp 335,254,700	1204	dokumen	Rp 627,927,330	Jumlah Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1204	dokumen	Rp 600,927,330	DAU	-	- 27,000,000	Rencana refocusing anggaran
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan	5	%	Rp 50,000,000	5	%	Rp 184,249,000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan	3	%	Rp 169,699,000	DAU	- 2	- 14,550,000	
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	50	laporan	Rp 44,410,000	50	laporan	Rp 178,578,000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	30	laporan	Rp 164,028,000	DAU	- 20	- 14,550,000	Rencana refocusing anggaran
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan	4	titik	Rp 5,590,000	4	titik	Rp 5,671,000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan	2	titik	Rp 5,671,000	DAU	- 2	-	Rencana refocusing anggaran

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024				P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN				
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP			TARGET IK	PAGU RP					
1	2	3	4	6		7		8		9		10		11		12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran	23	%	Rp	50,000,000	23	%	Rp	131,561,000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran	23	%	Rp	131,561,000	DBHDR	-	-	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota	12	kegiatan	Rp	50,000,000	12	kegiatan	Rp	131,561,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota	12	kegiatan	Rp	131,561,000	DBHDR	-	-	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah	8.8	%	Rp	2,081,032,000	8.8	%	Rp	6,830,558,985	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah	8.8	%	Rp	4,900,125,285		-	- 1,930,433,700	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	12.5	%	Rp	2,081,032,000	12.5	%	Rp	6,830,558,985	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	12.5	%	Rp	4,900,125,285		-	- 1,930,433,700	
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1	dokumen	Rp	1,000,000	1	dokumen	Rp	188,004,300	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang	1	dokumen	Rp	169,070,600	DAU	-	- 18,933,700	Rencana refocusing anggaran
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	800	Ha	Rp	2,080,032,000	800	Ha	Rp	6,642,554,685	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	800	Ha	Rp	4,731,054,685	DBHCH T	-	- 1,911,500,000	Rencana refocusing anggaran
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3	33	%	Rp	82,000,000	33	%	Rp	259,791,333	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3	33	%	Rp	259,791,333	DAU	-	-	
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis	100	%	Rp	66,668,000	100	%	Rp	126,389,333	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis	100	%	Rp	126,389,333	DAU	-	-	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan	30	dokumen	Rp	32,468,000	30	dokumen	Rp	88,798,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan	30	dokumen	Rp	88,798,000	DAU	-	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024				P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN				
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP						
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11	12		13		14	15=12-8	16=13-9	17
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan	30	laporan	Rp	34,200,000	30	laporan	Rp	37,591,333	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan	30	laporan	Rp	37,591,333	DAU	-	-	
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten	100	%	Rp	15,332,000	100	%	Rp	133,402,000	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten	100	%	Rp	133,402,000	DAU	-	-	
		fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan	1	dokumen	Rp	2,042,000	1	dokumen	Rp	2,042,000	fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan	1	dokumen	Rp	2,042,000	DAU	-	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda	3	dokumen	Rp	13,290,000	3	dokumen	Rp	131,360,000	Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda	3	dokumen	Rp	131,360,000	DAU	-	-	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU	53	%	Rp	109,998,040	53	%	Rp	414,557,830	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU	53	%	Rp	264,623,020	DAU	-	- 149,934,810	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024					SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK			PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	
1	2	3	4	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	15.3		Rp 109,998,040	15.3	%	Rp 414,557,830	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	15.3		Rp 264,623,020	DAU	-	- 149,934,810	
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan	45	dokumen	Rp 34,998,040	45	dokumen	Rp 78,304,040	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan	45	dokumen	Rp 78,304,040	DAU	-	-	
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15	badan usaha	Rp 50,000,000.00	15	badan usaha	Rp 289,298,290.00	Pengawasan Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15	badan usaha	Rp 159,363,480.00	DAU	-	- 129,934,810	Rencana refocusing anggaran
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pengembangan PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	5	orang	Rp 25,000,000	5	orang	Rp 46,955,500	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pengembangan PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	5	orang	Rp 26,955,500	DAU	-	- 20,000,000	Rencana refocusing anggaran
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	25	%	Rp 64,999,900	25	%	Rp 51,098,800	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA),	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	25	%	Rp 36,066,800	DAU	-	- 15,032,000	
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait	Jumlah MHA yang diakui	1	lembaga	Rp 24,999,900	1	lembaga	Rp 17,078,600	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait	Jumlah MHA yang diakui	1	lembaga	Rp 12,296,600	DAU	-	- 4,782,000	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	8	dokumen	Rp 24,999,900	8	dokumen	Rp 17,078,600	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	8	dokumen	Rp 12,296,600	DAU	-	- 4,782,000	Rencana refocusing anggaran
		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan	2	lembaga	Rp 40,000,000	2	lembaga	Rp 34,020,200	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan	2	lembaga	Rp 23,770,200	DAU	-	- 10,250,000	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN			
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP		
1	2	3	4	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan	2	dokumen	Rp 40,000,000	2	dokumen	Rp 34,020,200	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan	2	dokumen	Rp 23,770,200	DAU	-	- 10,250,000	Rencana refocusing anggaran
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan	5.16	%	Rp 40,000,000	5.16	%	Rp 100,000,000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan	5.16	%	Rp 100,000,000	DAU	-	-	
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	88	lembaga	Rp 40,000,000	88	lembaga	Rp 100,000,000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	88	lembaga	Rp 100,000,000	DAU	-	-	
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan	4	dokumen	Rp 40,000,000	4	dokumen	Rp 100,000,000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan	4	dokumen	Rp 100,000,000	DAU	-	-	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	2.8	%	Rp 20,000,000	2.8	%	Rp 70,000,000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	2.8	%	Rp 70,000,000	DAU	-	-	
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	4.58	%	Rp 20,000,000	4.58	%	Rp 70,000,000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	4.58	%	Rp 70,000,000	DAU	-	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024			P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	
1	2	3	4	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan	Jumlah Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Dun ia Usaha/Dunia Pendidikan/Filan troph i yang	4	entitas	Rp 20,000,000	4	entitas	Rp 70,000,000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam	Jumlah Masyarakat/Le mbaga Masyarakat/Du nia Usaha/Dunia Pendidikan/Fila	4	entitas	Rp 70,000,000	DAU	-	-	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan	100	%	Rp 45,000,000	100	%	Rp 124,368,100	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan	100	%	Rp 114,368,100	DAU	-	10,000,000	
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	100	%	Rp 45,000,000	100	%	Rp 124,368,100	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	100	%	Rp 114,368,100	DAU	-	10,000,000	
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	15	pengaduan	Rp 25,000,000	15	pengaduan	Rp 87,834,200	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	15	pengaduan	Rp 82,834,200	DAU	-	5,000,000	Rencana refocusing anggaran
		Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadu kewenangan kabupaten/kota	15	perkara	Rp 20,000,000	15	perkara	Rp 36,533,900	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadu kewenangan kabupaten/kota	15	perkara	Rp 31,533,900	DAU	-	5,000,000	Rencana refocusing anggaran
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase capaian pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	79.3	%	Rp 5,535,312,250	79.3	%	Rp 13,695,621,679	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase capaian pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	79.3	%	Rp 13,441,214,569	DAU	-	254,407,110	
			Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	32.1			%				32.1	%			DAU	-	-	
		Pengelolaan Sampah	Persentase capaian pengurangan sampah	22.2	%	Rp 5,535,312,250	22.2	%	Rp 13,695,621,679	Pengelolaan Sampah	Persentase capaian pengurangan sampah	22.2	%	Rp 13,441,214,569	DAU	-	254,407,110	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024					SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK			PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	
1	2	3	4	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
			Persentase capaian penanganan sampah	22.8	%	Rp 3,333,312,430	22.8	%	Rp 13,033,021,073		Persentase capaian penanganan sampah	22.8	%	Rp 13,771,419,303	DAU	-	-	
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan	33	kelompok	Rp 100,000,000	33	kelompok	Rp 110,000,000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan	33	kelompok	Rp 110,000,000	DAU	-	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan	1	dokumen	Rp 9,999,800	1	dokumen	Rp 39,433,400	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan	1	dokumen	Rp 39,433,400	DAU	-	-	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	8	unit	Rp 200,000,000	8	unit	Rp 300,573,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	8	unit	Rp 300,573,000	DAU	-	-	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan saph kabupaten/kota	2	dokumen	Rp 110,000,000	2	dokumen	Rp 75,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan saph	2	dokumen	Rp 75,000,000	DAU	-	-	
		Penanganan sampah melalui pengoprasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara	38	unit	Rp 1,300,000,000	38	unit	Rp 5,445,944,000	Penanganan sampah melalui pengoprasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara	38	unit	Rp 5,445,096,890	DAK	-	847,110	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN							
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)		TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP					
1	2	3	4	6		7		8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17			
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa,RDF, pusat pengomposan, biodegester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodegester, bank sampah dan fasilitas	111466	ton	Rp	3,176,450,000	111466	ton	Rp	6,982,092,800	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa,RD F, pusat pengomposan, biodegester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodegester, bank sampah	111466	ton	Rp	6,846,092,800	DAU	-	-	136,000,000	
		Pengurangan sampah melalui pendaur ulang sampah	jumlah sampah yang terdaur ulang	100	ton	Rp	538,862,450	100	ton	Rp	516,146,479	Pengurangan sampah melalui pendaur ulang	jumlah sampah yang terdaur ulang	100	ton	Rp	398,586,479	DAU	-	-	117,560,000	
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST	8591	ton	Rp	100,000,000	8591	ton	Rp	226,432,000	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST	8591	ton	Rp	226,432,000	DAU	-	-		
	TOTAL						Rp20,077,434,750				#####					Rp 33,444,487,727				#####		

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan DINAS LINGKUNGAN HIDUP yang disusun dengan berpedoman pada Renstra DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP ini didalamnya dirumuskan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif DINAS LINGKUNGAN HIDUP berdasarkan program, kegiatan subkegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan anggaran melalui mekanisme penentuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah.

Selanjutnya setelah Dokumen RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ditetapkan, menjadi pedoman DINAS LINGKUNGAN HIDUP dalam menyusun RKA (Rincian Kerja dan Anggaran) DINAS LINGKUNGAN HIDUP :

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati melalui kepala BAPPEDA (*Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*).

- b. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program-kegiatan-subkegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA sesuai dengan RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TELAH DITELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten PKR		
Kepala Bappelitbangda		
Kepala PD		
Kabag. Hukum		
Sekretaris PD		
Kabid Bappelitbangda		

PJ. BUPATI PASURUAN

DR. ANDRIYANTO, SH. M.KES

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan DINAS LINGKUNGAN HIDUP yang disusun dengan berpedoman pada Renstra DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP ini didalamnya dirumuskan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif DINAS LINGKUNGAN HIDUP berdasarkan program, kegiatan subkegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan anggaran melalui mekanisme penentuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah.

Selanjutnya setelah Dokumen RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ditetapkan, menjadi pedoman DINAS LINGKUNGAN HIDUP dalam menyusun RKA (Rincian Kerja dan Anggaran) DINAS LINGKUNGAN HIDUP :

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati melalui kepala BAPPEDA (*Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*).

- b. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program-kegiatan-subkegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA sesuai dengan RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PJ BUPATI PASURUAN

DR. ANDRIYANTO, SH. M.KES